

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



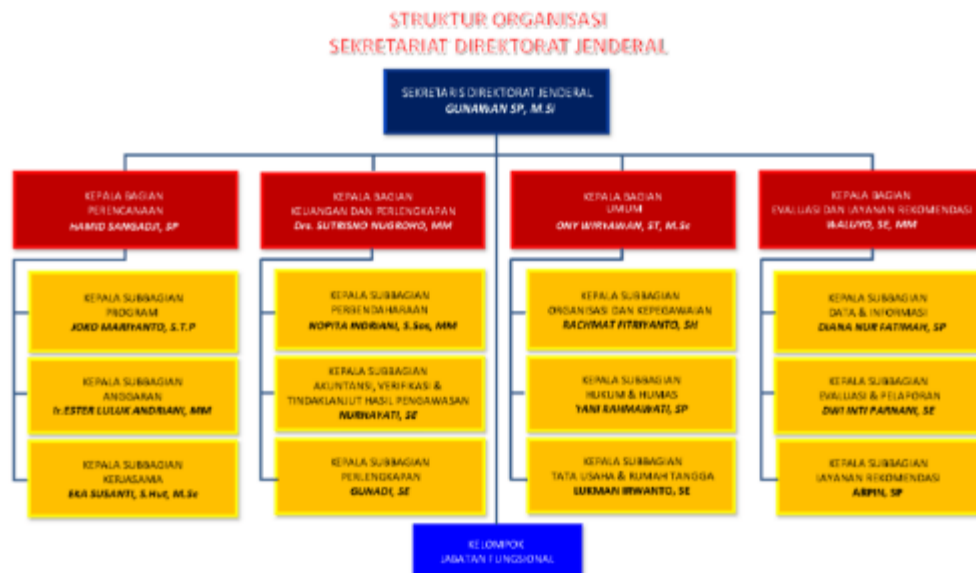
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.1 Logo Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian
Pertanian (Sumber: <https://psp.pertanian.go.id/tentang-kami/>)

Dikutip melalui laman resmi dari Kementerian Pertanian, psp.pertanian.go.id. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang terbentuk atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 2015. Landasan terakhir adalah, Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian dalam acuan peraturan di atas adalah bertugas untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam bidang pertanian.

Dalam relasinya dengan divisi HUMAS Kementerian Pertanian, adalah mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntable, profesional dan berintegritas tinggi. Hal ini terdapat di dalam misi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

(Sumber: <https://psp.pertanian.go.id/tentang-kami/>)

Divisi HUMAS Kementerian Pertanian, dikepalai oleh Yani Rahmawati yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas. Divisi HUMAS Kementerian Pertanian tergabung kedalam satu dari enam direktorat yang membentuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian. Yaitu, Sekeretaris Direktorat Jenderal yang dikepalai oleh Gunawan. Penulis melakukan kegiatan kerja magang di bawah pengawasan dan bimbingan dari Yani Rahmawati yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas.

Alur kerja yang diterapkan dalam produksi dari sebuah konten dalam Divisi Humas dimulai dengan agenda program yang telah dibuat oleh setiap kepala direktorat dalam Dirjen PSP. Kebutuhan terhadap elemen konten akan menjadi cukup beragam. Beberapa jenis konten dapat dikerjakan secara mandiri oleh Divisi HUMAS seperti rancangan konten sosial media, dan konten sebagai elemen pelengkap presetasi program. Namun pemanggilan pihak ketiga, seperti *Production House* eksternal dilakukan apabila memerlukan *treatment* khusus dalam produksi sebuah konten. Sebelum hal tersebut dimulai, tahap utama dalam alur kerja Divisi

Humas diawali dengan rapat diskusi untuk menemukan gagasan atau ide yang akan dijahit kedalam sebuah konsep. Bentuk dari konsep ini bisa berupa sebuah narasi, *storyline*, hingga sebuah skenario. Dalam tahap awal ini pula, konsep artistik, hingga *editing*. Serta, pemilihan lokasi dan pemain juga dilakukan.

Seluruh konsep dan kebutuhan termasuk pemanggilan vendor pihak ketiga, harus disetujui oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, yaitu Yani Rahmawati. Proses selanjutnya adalah tahapan produksi dan paska produksi yang pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan *production house* pada umumnya. Hasil akhir dari sebuah konten video maupun grafis ini, kembali akan diajukan kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, dan kepada kepala direktorat terkait yang berafiliasi dengan konten tersebut, sebelum akhirnya ditayangkan. Namun cukup sampai Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas apabila akan naik pada sosial media maupun laman website resmi Kementerian Pertanian.

Perancangan konten ini, sudah termasuk dalam rencana kerja tahunan yang dimiliki oleh Divisi HUMAS dalam bertugas pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana. Namun, dalam beberapa konten, bersifat eksternal di luar dari rencana kerja tahunan. Konten eksternal ini dapat berupa konten-konten harian untuk sosial media dan dokumentasi acara, yang menjadi tanggung jawab bagi Divisi HUMAS.